

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025-2029



RENSTRA
KECAMATAN MATESIH
TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan hidayah Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Matesih Tahun 2025-2029 Kabupaten Karanganyar dapat diselesaikan. Dokumen Renstra Kecamatan Matesih Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan menjadi acuan bagi.

Penyusunan dokumen perencanaan ini berpedoman pada Inmendagri Nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Matesih Tahun 2025-2029 disusun dengan berdasarkan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah di lingkup Kecamatan Matesih.

Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap perangkat daerah di Kecamatan Matesih yang telah menyediakan data dan informasi serta masukan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga penyusunan ini bermanfaat bagi kemajuan Kecamatan Matesih dimasa mendatang.

Matesih, 19 September 2025
Camat Matesih

SUGIHARJO, S.IP, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19711108 199203 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I- 1
1.2 Landasan Hukum	I- 1
1.3 Maksud dan Tujuan	I- 3
1.4 Sistematika Penulisan	I- 3
BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	II- 1
2.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah	II- 1
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	II- 12
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III- 1
3.1 Tujuan dan Sasaran	III- 1
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	III- 4
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV- 1
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	IV- 1
4.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan	IV- 9
4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV- 9
BAB V PENUTUP	V - 1
5.1 Kaidah Pelaksanaan	V - 1
5.2 Pedoman Transisi	V - 3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Matesih Tahun 2025	II-3
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Kecamatan Matesih Tahun 2025	II-4
Tabel 2.3	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Matesih Tahun 2025	II-4
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 -2024	II-7
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Program Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 -2024	II-7
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Keuangan Kecamatan Matesih Tahun 2021 - 2024	II-8
Tabel 2.7	Permasalahan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar	II-13
Tabel 2.8	Perumusan Isu Strategis Kecamatan Matesih	II-15
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar	III-3
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Matesih Tahun 2025 - 2030	III-5
Tabel 3.3	Pentahapan Renstra Kecamatan Matesih Tahun 2026 - 2030	III-8
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rentra Kecamatan Matesih	IV-4
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2030	IV-10
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-17
Tabel 4.4	Dukungan Kegiatan Kecamatan Matesih Terhadap 35 Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah yang Didelegasikan ke Kabupaten/Kota	IV-20
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Matesih Tahun 2025 - 2030	IV-21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Kecamatan	II-1
Gambar 4.1.	Pohon Kinerja Kecamatan Matesih	IV-16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan di tingkat kecamatan. Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi Kecamatan Matesih dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan fasilitasi pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan.

Landasan hukum penyusunan Renstra ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya perencanaan pembangunan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain itu, Renstra Kecamatan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah, termasuk kecamatan, perlu menyusun dokumen perencanaan lima tahunan untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah.

Renstra ini disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dokumen ini juga diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Sebagai perangkat daerah yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan Bupati di wilayah kecamatan, Kecamatan Matesih memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program-program pembangunan daerah melalui fungsi koordinasi lintas sektor, fasilitasi kegiatan pembangunan, serta pelayanan administratif kepada masyarakat. Tantangan pembangunan di wilayah Kecamatan Matesih antara lain meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dasar dan sosial yang merata.

Dengan demikian, Renstra Kecamatan Matesih Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta mendorong sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Matesih.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Matesih Tahun 2025–2029 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 181).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan; dan
2. Memberikan arah dalam melayani masyarakat sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen aparatur Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah disepakati bersama.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar yang memuat program dan kegiatan.

1.4. Sistematika

Renstra Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah, memuat gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan, memuat tujuan renstra perangkat daerah, sasaran renstra perangkat daerah, strategi perangkat daerah, arah kebijakan perangkat daerah

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, memuat Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V Penutup, Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

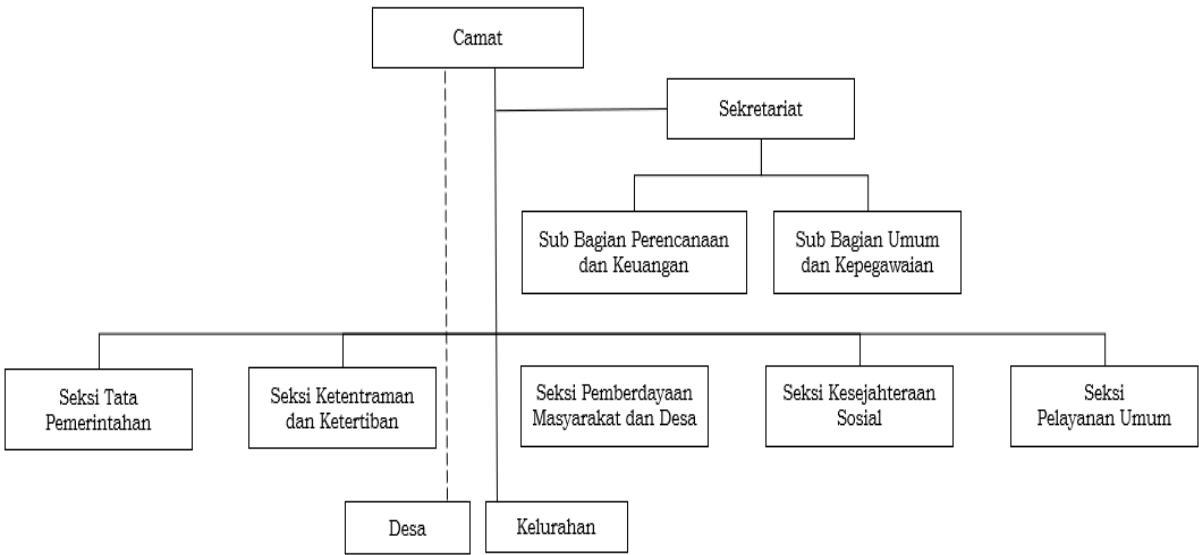
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kedudukan Kecamatan dalam Organisasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar yaitu merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan.

Susunan organisasi Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Kepala Seksi Pelayanan Umum, dan ;
- h. Desa.

Struktur Organisasi dan tata kerja tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan

Adapun uraian tugas dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerin tahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;
- c. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaporan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi. Sekretaris melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pengkoordinasian kegiatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

4. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban.

5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan Sosial.

7. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (pegawai) baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pegawai Kecamatan Matesih berjumlah 36 orang, terdiri dari 13 orang (32,5 %) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 23 orang (67,5 %) Pegawai Tidak Tetap (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin diketahui sebanyak 36 orang terdiri dari pegawai laki-laki sebanyak 16 orang dan pegawai perempuan sebanyak 20 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Matesih Tahun 2025

No .	Tingkat Pendidikan	Kategori				Jumlah	
		PNS		NON PNS			
		L	P	L	P	L	P
1	SMP/ Sederajat	0	0	0	0	0	0
2	SMA/ Sederajat	2	3	11	3	13	6
3	Diploma 3	0	1	0	1	0	2
4	Sarjana/ S1	2	1	0	8	2	9
5	Magister/ S2	1	3	0	0	1	3
		5	8	11	12	16	20

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Matesih (2025)

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 sebanyak 3 orang; berpendidikan S1 sebanyak 9 orang; pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 6 orang.

Berdasarkan golongan pegawai di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar didominasi oleh Golongan III sebanyak 6 orang, Golongan IV sebanyak 4 orang. Selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Sumber daya manusia (pegawai) adalah faktor sentral dalam suatu institusi atau organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan

tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Matesih Tahun 2025

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan I	0
2	Golongan II	3
3	Golongan III	6
4	Golongan IV	4
5	Non PNS	23
	Jumlah	36

Sumber : *Data Kepegawaian Kecamatan Matesih (2025)*

Berdasarkan golongan kepangkatan pegawai diketahui sebanyak 13 orang ASN, Golongan I sebanyak 0 orang ASN, Golongan II sebanyak 3 (tiga) orang ASN, Golongan III sebanyak 6 (enam) orang ASN, Golongan IV sebanyak 4 (empat) orang ASN, dan Non ASN Sebanyak 23 (dua puluh tiga) Orang. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung pegawai, maka dilakukan pembinaan pegawai yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing - masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing - masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi menjadi hal yang sangat urgen untuk disediakan dalam kondisi baik. Ketersediaan sarana dan prasana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Matesih. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Matesih keadaan tahun 2025 dalam mendukung pelaksanaan tugas dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Matesih
Tahun 2025

No .	Jenis barang>Nama Barang	Kondisi			Jumla h
		Bai k	Kurang Baik	Tidak Baik	
1	Meja Kayu	8			8
2	Kursi Kayu			10	10
3	Filling Besi/Metal	24			24
4	Sepeda Motor	4			4
5	Kursi Pejabat Eselon	10			10
6	Meja Kerja Pejabat Eselon	9			9
7	Kursi Lipat	80			80
8	Soundsystem	2			2
9	Mimbar	1			1
10	Meja 1/2 Biro	24	2		26
11	Laptop	6	2		8
12	Wareless	1			1
14	Kursi Tamu	4			4
15	Kursi Biasa			25	25
16	Gorden	18			18
17	Lemari Kayu	1	4		5

No .	Jenis barang>Nama Barang	Kondisi			Jumla h
		Bai k	Kurang Baik	Tidak Baik	
18	Tempat Tidur Kayu	1			1
19	Meja Rapat	13	1		14
20	Kasur	1			1
21	PC UNIT	8		3	11
22	SSD	1			1
23	Printer	10		3	13
24	Vidio Monitor	1			1
25	Rak TV	1			1
26	Mesin Potong Rumput	1		1	2
27	Lemari Es	1			1
28	AC Split	7			7
29	Kompor Gas	1			1
30	Tabung Gas	1			1
31	TV	2			2
32	Lemari Arsip Dinamis	2			2
33	Rak Besi Arsip Dinamis	2			2
34	Kursi Besi	25			25
35	Handycam	1			1
36	Prortabel Generating Set	1			1
37	Kipas Angin	14			14
38	Alat Dapur Lainnya	18			18
39	Station Wagon/Mobil Dinas	1			1
40	Proyektor+Attachment	1			1
41	Dispenser	2			2
42	Gedung Kantor Permanen	3	1		4
43	Bangunan Kantor Pemerintah	5			5
44	Scanner	2			2
45	Penyemprot Otomatis	1			1
46	Keyboard	5			5
47	Alat Pemadam	1			1

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan data capaian kinerja Kecamatan Matesih, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan tren peningkatan positif selama periode 2021–2024. Indeks Reformasi Birokrasi meningkat dari 63 pada tahun 2021 menjadi 72 pada tahun 2023 dan dipertahankan hingga 2024, mencerminkan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik di tingkat kecamatan. Nilai SAKIP juga mengalami peningkatan dari 67,15 pada tahun 2021 menjadi 70,30 pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja yang lebih akuntabel dan transparan. Selain itu, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat signifikan dari 83,05 pada tahun 2021 menjadi 96 sejak tahun 2023, menandakan pelayanan kepada masyarakat semakin responsif dan berkualitas.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan komitmen Kecamatan Matesih dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, serta berorientasi pada peningkatan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagian besar indikator lainnya menunjukkan kinerja optimal dengan pencapaian 100 persen target secara konsisten sepanjang periode pengamatan. Hal ini meliputi persentase indikator OPD yang tercapai, wilayah kondusif, kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan, lembaga kemasyarakatan aktif, serta ketertiban Perda. Konsistensi capaian ini mengindikasikan efektivitas implementasi program dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan Renstra, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek kepuasan pelayanan masyarakat untuk mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi anggaran program kecamatan menunjukkan kinerja yang beragam selama periode 2021-2024. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai program terbesar dengan alokasi mencapai 2,4 miliar rupiah pada tahun 2024 menunjukkan tingkat realisasi yang cukup konsisten antara 92-98 persen. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempertahankan realisasi optimal 100 persen pada tahun 2021-2023, namun mengalami penurunan menjadi 92 persen pada tahun 2024 meski anggarannya meningkat drastis menjadi 111,6 juta rupiah. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan menunjukkan kestabilan dengan realisasi 99-100 persen, kecuali fluktuasi anggaran yang signifikan pada tahun 2023.

Program koordinasi dan pembinaan menampilkan variabilitas realisasi yang lebih tinggi. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mengalami penurunan realisasi dari 100 persen menjadi 91 persen pada tahun 2024, sementara Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum relatif stabil dengan realisasi 91-100 persen. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa menunjukkan fluktuasi paling ekstrem dengan realisasi terendah 37 persen pada tahun 2022, meskipun kembali mencapai 100 persen pada tahun 2024. Secara keseluruhan, efektivitas pengelolaan anggaran program masih memerlukan konsistensi untuk mengoptimalkan pencapaian target pembangunan daerah.

Berdasarkan sasaran atau target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Matesih. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Matesih dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu :

Tabel 2.4.
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Kecamatan Matesih
Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 -2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks		63	64	72		63	64	72		63	64	72
2	Nilai SAKIP OPD	Nilai	67	69	70	72	67,15	68,15	69,40	70,30	67,15	68,15	69,40	70,30
3	Nilai IKM	Nilai	100	100	100	100	83,05	96,29	96	96	83,05	96,29	96	96

Tabel 2.5.
Capaian Kinerja Program Kecamatan Matesih
Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 -2024

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	Nilai IKM	Nilai	100	100	100	100	83,05	96,29	96	96	83,05	96,29	96	96
3	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang terkoordinasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase tertib perda	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.6.
Capaian Kinerja Keuangan Kecamatan Matesih
Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 -2024

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	440.380.000	2.139.803.000	2.759.462.566	2.444.957.574	429.830.344	2.066.387.534	2.534.951.700	2.271.972.752	98	97	92	93
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.000.000	8.000.000	10.093.200	6.000.000	9.000.000	8.000.000	10.000.000	6.000.000	100	100	99	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.778.473.000	1.849.592.566	1.934.158.424		1.709.168.634	1.647.940.600	1.817.299.918		96	89	94
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000	6.000.000	6.247.000	6.000.000	4.000.000	6.000.000	6.247.000	3.501.400	100	100	100	58
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.327.500	19.905.000	25.197.200	23.819.000	18.327.500	19.905.000	25.197.200	23.819.000	100	100	100	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.995.500	8.485.000	6.425.000	6.000.000	7.995.500	8.485.000	6.425.000	6.000.000	100	100	100	100
		11.000.000	8.000.000	9.980.800	10.014.700	11.000.000	8.000.000	9.775.000	10.012.000	100	100	98	100

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.380.000	1.935.000	1.980.000	1.980.000	1.380.000	98	100	100	100
	Penyediaan Bahan/Material	6.807.500	6.000.000	5.356.500	6.300.000	6.807.500	5.977.200	5.267.375	3.523.400	100	100	98	56
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.632.000	34.435.000	70.315.000	94.255.000	47.632.000	31.235.000	67.162.000	83.885.000	100	91	96	89
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD												
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.369.500	10.995.000			28.357.000	8.970.000			100	82		
	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		50.000.000	400.000.000	19.825.000		49.700.000	399.029.243	16.000.000		99	100	81
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			113.006.800	85.240.450			105.981.800	82.740.450			94	97
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.000.000	25.800.000	38.400.000	38.400.000	20.288.094	24.251.200	31.630.982	27.518.584	70	94	82	72
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.720.000	155.040.000	187.440.000	157.400.000	138.720.000	155.040.000	187.440.000	144.430.000	100	100	100	92
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.548.000	26.690.000	32.698.500	32.550.000	36.567.750	24.185.500	28.145.500	26.623.000	97	91	86	82
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	5.490.000	2.730.000	23.615.000	99.200.000	5.490.000	2.730.000	19.240.000	99	100	100	81
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.000.000	5.000.000	5.000.000	111.600.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	102.800.000	100	100	100	92
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.000.000	5.000.000	5.000.000	111.600.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	102.800.000	100	100	100	92
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN	19.000.000	22.720.000	237.800.000	39.455.000	18.970.000	22.720.000	235.633.000	39.037.000	100	100	99	99
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	5.000.000	5.000.000	8.000.000	9.000.000	4.970.000	5.000.000	6.370.000	8.582.000	99	100	80	95

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pembangunan di Desa												
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000	17.720.000	15.000.000	30.455.000	14.000.000	17.720.000	15.000.000	30.455.000	100	100	100	100
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			214.800.000				214.263.000				100	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	55.200.000	243.400.000	228.650.000	164.040.000	55.151.000	235.000.000	227.680.000	149.040.000	100	97	100	91
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	55.200.000	243.400.000	228.650.000	164.040.000	55.151.000	235.000.000	227.680.000	149.040.000	100	97	100	91
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.620.000	78.500.000	90.500.000	51.350.000	19.700.000	73.000.000	90.275.000	49.850.000	91	93	100	97
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16.620.000	23.500.000	88.500.000	40.350.000	14.700.000	18.000.000	88.275.000	38.850.000	88	77	100	96
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5.000.000	55.000.000	2.000.000	11.000.000	5.000.000	55.000.000	2.000.000	11.000.000	100	100	100	100
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.000.000	17.600.000	8.220.000	4.000.000	14.000.000	6.500.000	6.480.000	4.000.000	100	37	79	100

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.000.000	17.600.000	8.220.000	4.000.000	7.000.000	6.500.000	6.480.000	4.000.000	100	37	79	100
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.000.000				7.000.000				100			

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

1. Masyarakat Umum

Masyarakat umum merupakan kelompok sasaran utama dari layanan kecamatan. Mereka mencakup seluruh warga yang berdomisili atau memiliki kepentingan administratif di wilayah kecamatan, termasuk penduduk tetap, pendatang, dan kelompok rentan. Kecamatan memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat umum, antara lain pengantar administrasi kependudukan (seperti KTP, KK, akta kelahiran, surat pindah), surat keterangan domisili, surat keterangan usaha, dan surat pengantar lainnya. Selain itu, kecamatan juga menjadi tempat masyarakat mengajukan pengaduan, konsultasi, serta mendapatkan informasi terkait pelayanan publik. Peran kecamatan adalah memudahkan akses warga terhadap layanan pemerintah dan memastikan bahwa pelayanan berlangsung cepat, akuntabel, dan transparan.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan kelompok sasaran penting yang dibina kecamatan sebagai perpanjangan tangan bupati. Layanan meliputi fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RKPDDes, APBDDes), evaluasi kinerja, pembinaan administrasi dan keuangan desa, penyampaian kebijakan kabupaten, penyelesaian permasalahan antarwarga, serta fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa.

3. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan meliputi organisasi-organisasi lokal seperti PKK, Karang Taruna, RT/RW, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), kelompok tani, kelompok perempuan, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Kecamatan memiliki tugas untuk membina dan memfasilitasi kegiatan lembaga-lembaga ini dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dukungan yang diberikan dapat berupa pelatihan kapasitas kelembagaan, penyediaan informasi program pemerintah, fasilitasi kegiatan gotong royong, dan penyaluran bantuan pemberdayaan masyarakat. Peran lembaga kemasyarakatan sangat penting dalam menjembatani pemerintah dengan warga, sehingga kecamatan berkewajiban memperkuat peran serta mereka melalui pendekatan partisipatif dan inklusif.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Beberapa masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan program/ kegiatan di atas antara lain adalah :

1. Kapasitas SDM aparat kecamatan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat belum optimal.

Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di tingkat kecamatan masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun keterampilan. Aparat kecamatan seringkali belum sepenuhnya menguasai tugas-tugas pelayanan publik, administrasi, maupun

- teknis lainnya. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.
2. **Sistem kerja kecamatan belum terumuskan dengan jelas.**
Kecamatan belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) dan alur kerja yang terdokumentasi secara sistematis, sehingga pelaksanaan tugas sering bersifat tidak konsisten. Akibatnya, koordinasi internal maupun eksternal menjadi kurang efektif.
 3. **Pengelolaan administrasi belum optimal.**
Administrasi pemerintahan, pelaporan kegiatan, pengarsipan, dan manajemen data masih belum berjalan secara tertib dan efisien. Banyak kegiatan administrasi masih dilakukan secara manual, dan belum terintegrasi dengan sistem informasi yang memadai.
 4. **Wilayah yang harus dilayani cukup luas, dihadapkan dengan persoalan sarana kerja yang belum memadai.**
Wilayah kerja kecamatan yang luas dengan medan geografis yang bervariasi membutuhkan mobilitas dan jangkauan layanan yang tinggi. Namun, fasilitas kerja seperti kendaraan dinas, perangkat teknologi, dan sarana komunikasi masih terbatas dan kurang memadai untuk mendukung pelayanan yang optimal.
 5. **Kurang pedulinya masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan akibat ketidakpuasan karena seringkali aspirasi mereka tidak terwujud dalam realisasi pembangunan.**
Masyarakat enggan terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan karena merasa aspirasinya tidak didengar atau tidak diwujudkan dalam program nyata. Ketidakpercayaan ini menciptakan jarak antara pemerintah dan warga dalam proses pembangunan.
 6. **Potensi lokal belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung perkembangan ekonomi masyarakat.**
Banyak potensi yang dimiliki oleh wilayah kecamatan, seperti hasil pertanian, kerajinan, pariwisata, atau sumber daya alam, belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut sering belum diolah dengan baik atau belum mendapat dukungan yang cukup agar bisa berkembang.

Tabel 2.7.

Permasalahan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum optimalnya kinerja serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kinerja pendukung pelayanan kecamatan belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	- Jumlah aparatur belum sebanding dengan kebutuhan - Kompetensi SDM belum merata - Beban kerja antar pegawai belum seimbang - Laporan keuangan dan kinerja desa belum sesuai waktu yang ditentukan - Kapasitas administrasi perangkat desa masih bervariasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum optimalnya mutu pelayanan publik kepada masyarakat desa	Penerapan standar pelayanan publik belum berjalan optimal	• Standar pelayanan kepada masyarakat desa belum optimal • Dukungan sarpras pelayanan sebagian di luar kewenangan kecamatan • Wilayah kecamatan cukup luas dibanding SDM yang tersedia • Titik rawan sosial dan keamanan di desa belum tertangani • Pemahaman penegakan PERDA belum merata • SOP pelayanan belum dijalankan secara konsisten
Belum optimalnya dukungan pembangunan desa dan pelayanan sosial	Fasilitasi pembangunan dan pelayanan sosial desa belum berjalan optimal	• Data penerima bantuan sosial tidak terpadu antar sumber • Sebagian pengaduan masyarakat desa belum ditindaklanjuti • Dukungan kelembagaan desa terhadap program prioritas belum optimal

2.2.2. Isu Strategis

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efektif, Kecamatan Matesih dihadapkan pada berbagai tantangan strategis yang perlu segera diidentifikasi dan dikelola. Isu-isu strategis ini mencerminkan kondisi aktual yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan kepada masyarakat dan pemerintahan desa, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara keseluruhan. Dengan memahami isu-isu tersebut secara komprehensif, Kecamatan Matesih dapat merumuskan langkah-langkah kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran, berorientasi pada perbaikan kualitas pelayanan, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan sinergi dengan masyarakat dan desa.

Analisis terhadap isu strategis ini menjadi landasan penting dalam merancang program kerja dan inovasi ke depan, guna mewujudkan pelayanan publik yang prima, pemerintahan yang transparan, dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Tabel 2.8.
Perumusan Isu Strategis Kecamatan Matesih

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
a. Kedekatan Hubungan Sosial antara Kecamatan, Desa, dan Masyarakat b. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Mulai Berkembang c. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Reformasi Birokrasi d. Sumber Daya Manusia yang Berpotensi untuk Dikembangkan e. Komitmen Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur f. Penerapan Sistem Pengelolaan Kinerja yang Lebih Efektif	a. Kapasitas SDM aparat kecamatan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat belum optimal. b. Sistem kerja kecamatan belum terumuskan dengan jelas. c. Pengelolaan administrasi belum optimal. d. Wilayah yang harus dilayani cukup luas, dihadapkan dengan persoalan sarana kerja yang belum memadai. e. Kurang pedulinya masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan akibat ketidakpuasan karena seringkali aspirasi mereka tidak terwujud dalam realisasi pembangunan. f. Potensi lokal belum dimanfaatkan secara maksimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan berkaitan dengan kemitraan dan kerjasama pemerintah	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (<i>peace, justice, and strong institutions</i>)	Tata Kelola Pemerintahan belum optimal	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Belum optimalnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
	untuk mendukung perkembangan ekonomi masyarakat.					

Sumber : Data Kecamatan Matesih

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka, disimpulkan isu strategis pembangunan jangka menengah Kecamatan sebagai berikut : **Belum optimalnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa.** Belum optimalnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa sering kali disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara aparat kecamatan dan perangkat desa. Banyak desa merasa belum mendapatkan pendampingan yang memadai dari kecamatan, baik dalam aspek administratif, teknis, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan program. Hal ini menyebabkan desa harus menyelesaikan berbagai persoalan secara mandiri, yang seringkali di luar kapasitas mereka, sehingga berdampak pada kualitas pelayanan publik di tingkat desa yang belum merata dan maksimal. Masih banyak pegawai kecamatan yang belum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup, serta jumlah pegawai yang belum memadai. Hal ini menyulitkan kecamatan dalam memberikan pelayanan yang baik, menjalin kerja sama dengan pihak lain, dan membantu menyelesaikan urusan masyarakat secara cepat dan tepat. Fasilitas seperti komputer, kendaraan dinas, jaringan internet, dan ruang pelayanan yang tersedia belum digunakan secara efektif. Ada yang belum difungsikan dengan baik atau tidak dimanfaatkan sesuai kebutuhan, sehingga kinerja pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang optimal.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mendukung visi dan misi RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka diperlukan perumusan tujuan yang jelas, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan daerah serta kebijakan nasional. Tujuan strategis ini disusun berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta tantangan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Adapun dalam proses penyusunannya, perumusan tujuan dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta lembaga kemasyarakatan. Berdasarkan gambaran tersebut, tujuan yang dirumuskan diharapkan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat Matesih dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

Untuk pencapaian tujuan strategis Kecamatan Matesih Tahun 2025–2029, perlu disusun sasaran yang lebih spesifik, terukur, dan operasional. Sasaran ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan potensi, permasalahan, serta tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Melalui perumusan sasaran ini, Kecamatan Matesih berupaya memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki fokus yang jelas, berorientasi pada hasil, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah. Sasaran yang dirumuskan juga menjadi pedoman dalam menetapkan indikator kinerja, target capaian, serta prioritas pembangunan lima tahun mendatang.

Perencanaan pembangunan kewilayahan dapat digambarkan dari dokumen perencanaan kecamatan. Tujuan pembangunan lima tahun ke depan untuk Kecamatan Matesih dalam rangka mencapai Visi RPJMD 2025-2029 yaitu khususnya Visi **"SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR"** Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera" sesuai Misi ke-4 Bupati "Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik" ke dalam program dan kegiatan Kecamatan Matesih.

Merujuk pada instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD, disampaikan bahwa tujuan perangkat daerah disusun dengan memperhatikan NSPK kementerian dan tujuan serta sasaran daerah. Tujuan daerah yang diacu dalam penyusunan Renstra adalah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Sasaran Daerah Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah dengan indikator Indeks Pelayanan Publik. Berdasarkan tujuan dan sasaran daerah maka tujuan renstra Kecamatan Matesih adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan**. Dalam rangka mencapai tujuan diatas sasaran yang dirumuskan adalah

Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan indikator **Nilai IKM**.

Adapun uraian tujuan, sasaran, indikator dan target Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar tahun 2025 sampai 2029 akan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar

No	NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Tahun					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	TJ 1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Sasaran 1: Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	Nilai	89,23	82	83	83,1	83,2	83,3	83,4

Sumber : Hasil Analisis Data Kecamatan Matesih

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Matesih Tahun 2025-2029 agar berjalan secara efektif dan berkelanjutan, ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Penguatan Dasar-Dasar Pelayanan dan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan.
2. Modernisasi Pelayanan Kecamatan dan Pemerintahan.
3. Akselerasi Peningkatan Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja Kecamatan.
4. Peningkatan Konsolidasi dan Penyempurnaan Layanan Prima di Kecamatan.
5. Pemajuan Layanan dan Pemerintahan Secara Mandiri Berbasis Digital.

Arah Kebijakan Pembangunan Kecamatan Matesih dengan memperhatikan arah kebijakan RPJMD yaitu Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat difokuskan pada :

1. Penguatan Dasar-Dasar Pelayanan dan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan
Arah Kebijakan :
 - a. Penyesuaian SOP pelayanan umum dan pemerintahan desa
 - b. Pelatihan dasar aparatur.
 - c. Pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana.
 - d. Pengembangan awal sistem administrasi berbasis IT.
2. Modernisasi Pelayanan Kecamatan dan Pemerintahan
Arah Kebijakan :
 - a. Implementasi layanan publik berbasis digital.
 - b. Pengadaan sarana prasarana berbasis TI.
 - c. Integrasi pelayanan kecamatan dan desa.
 - d. Sistem pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis aplikasi
3. Akselerasi Peningkatan Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja Kecamatan
Arah Kebijakan :
 - a. Optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja.
 - b. Peningkatan kualitas evaluasi periodik kinerja pelayanan.
 - c. Penguatan pembinaan pemerintahan desa.
 - d. Penyempurnaan laporan kinerja.
4. Peningkatan Konsolidasi dan Penyempurnaan Layanan Prima di Kecamatan
Arah Kebijakan :
 - a. Standarisasi layanan prima ramah kelompok rentan.
 - b. Integrasi data administrasi secara penuh.
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam evaluasi layanan.
5. Pemajuan Layanan dan Pemerintahan Secara Mandiri Berbasis Digital
Arah kebijakan:
 - a. Pelayanan publik dan administrasi 100% berbasis digital.
 - b. Peningkatan kemandirian pemerintahan desa berbasis teknologi.
 - c. Peningkatan inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat.

Adapun keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Matesih Tahun 2025-2029 akan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Matesih Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Modernisasi Pelayanan Kecamatan dan Pemerintahan	Peningkatan kualitas pelayanan di kecamatan dan desa/kelurahan.	1. Implementasi layanan publik berbasis digital 2. Pengadaan sarana prasarana berbasis TI 3. Integrasi pelayanan kecamatan dan desa 4. Sistem pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis aplikasi
		Peningkatan Konsolidasi dan Penyempurnaan Layanan Prima di Kecamatan		1. Standarisasi layanan prima ramah kelompok rentan 2. Integrasi data administrasi secara penuh 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam evaluasi layanan
		Pemajuan Layanan dan Pemerintahan Secara Mandiri Berbasis Digital		1. Pelayanan publik dan administrasi 100% berbasis digital. 2. Peningkatan kemandirian pemerintahan desa berbasis teknologi. 3. Peningkatan inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat.
		Penguatan Dasar-Dasar Pelayanan dan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian	1. Penyesuaian SOP pelayanan umum dan pemerintahan desa 2. Pelatihan dasar aparatur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dan evaluasi pembangunan daerah	3. Pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana 4. Pengembangan awal sistem administrasi berbasis IT
		Akselerasi Peningkatan Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja Kecamatan		1. Optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja 2. Peningkatan kualitas evaluasi periodik kinerja pelayanan 3. Penguatan pembinaan pemerintahan desa 4. Penyempurnaan laporan kinerja

Sumber : Hasil Analisis Data Kecamatan Matesih

Pelaksanaan rencana strategis Kecamatan Matesih Tahun 2025–2029. Penahapan ini bertujuan untuk mengatur langkah-langkah prioritas yang dilaksanakan secara bertahap setiap tahun, sesuai dengan kapasitas sumber daya, dinamika kebutuhan masyarakat, dan perkembangan teknologi.

Melalui strategi penahapan, kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Matesih dapat lebih terarah, sistematis, dan terukur, sehingga setiap tahapan dapat saling mendukung dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Penahapan ini juga menjadi dasar untuk menetapkan program dan kegiatan tahunan yang diselaraskan dengan agenda pembangunan daerah serta kebijakan nasional. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta akselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel di wilayah Kecamatan Matesih.

Adapun penahapan rencana strategis Kecamatan Matesih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Pentahapan Renstra Kecamatan Matesih Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Dasar-Dasar Pelayanan dan Pemerintahan Rincian Kegiatan : 1. Penyesuaian SOP pelayanan umum dan pemerintahan desa 2. Pelatihan dasar aparatur 3. Pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana 4. Pengembangan awal sistem administrasi berbasis IT	Modernisasi Pelayanan Publik dan Pemerintahan Rincian Kegiatan : 1. Modernisasi pelayanan publik melalui implementasi sistem layanan berbasis digital. 2. Penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi. 3. Integrasi pelayanan antara kecamatan dan pemerintahan desa. 4. Optimalisasi sistem pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis aplikasi.	Akselerasi Peningkatan Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja Rincian Kegiatan : 1. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja aparatur. 2. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala dan berkualitas. 3. Penguatan mekanisme pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. 4. Penyempurnaan laporan kinerja.	Peningkatan Konsolidasi dan Penyempurnaan Layanan Prima Rincian Kegiatan : 1. Konsolidasi kualitas pelayanan publik menuju layanan prima dan berkualitas. 2. Integrasi penuh data administrasi pemerintahan. 3. Replikasi dan penerapan praktik pelayanan terbaik di seluruh desa. 4. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penilaian pelayanan publik.	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Desa yang Berdaya dan Inklusif Rincian Kegiatan : 1. Realisasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sepenuhnya berbasis digital. 2. Mendorong kemandirian pemerintahan desa berbasis teknologi. 3. Pengembangan inovasi pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan penahapan di atas, prioritas pembangunan setiap tahun yang disusun berdasarkan kebutuhan, tantangan, dan peluang yang ada di kecamatan. Penetapan prioritas pembangunan kecamatan secara terstruktur dan bertahap, diharapkan setiap langkah yang diambil dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan. Mengacu pada tahapan di atas, fokus prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2026

Tahap I tahun 2026 diarahkan pada “Penguatan Dasar-Dasar Pelayanan dan Pemerintahan”. Adapun kegiatan difokuskan pada:

- a. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan umum dan pemerintahan desa.
- b. Penguatan kapasitas awal aparatur melalui pelatihan dasar.
- c. Pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan.
- d. Pengembangan sistem administrasi pemerintahan berbasis teknologi informasi.

2. Tahun 2027

Tahap II tahun 2027 diarahkan pada “Modernisasi Pelayanan Publik dan Pemerintahan”. Adapun program prioritas difokuskan pada:

- a. Modernisasi pelayanan publik melalui implementasi sistem layanan berbasis digital.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi.
- c. Integrasi pelayanan antara kecamatan dan pemerintahan desa.
- d. Optimalisasi sistem pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis aplikasi.

3. Tahun 2028

Tahap III tahun 2028 diarahkan pada “Penguatan Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja”. Adapun arah kebijakan tahun 2028 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja aparatur.
- b. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala dan berkualitas.
- c. Penguatan mekanisme pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d. Penyempurnaan laporan kinerja.

4. Tahun 2029

Tahap IV tahun 2029 diarahkan pada “Konsolidasi dan Penyempurnaan Layanan Prima”. Adapun program prioritas difokuskan pada:

- a. Konsolidasi kualitas pelayanan publik menuju layanan prima dan berkualitas.
- b. Integrasi penuh data administrasi pemerintahan.
- c. Replikasi dan penerapan praktik pelayanan terbaik di seluruh desa.
- d. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penilaian pelayanan publik.

5. Tahun 2030

Tahap V tahun 2030 diarahkan pada “Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Desa yang Berdaya dan Inklusif”. Adapun program prioritas difokuskan pada:

- a. Realisasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sepenuhnya berbasis digital.
- b. Mendorong kemandirian pemerintahan desa berbasis teknologi.

- c. Pengembangan inovasi pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan yang diinginkan seperti tersebut diatas, akan ditempuh melalui berbagai program dan indikasi kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan di tingkat desa dan kelurahan. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini difokuskan pada menjaga stabilitas sosial dan menciptakan ketenteraman serta ketertiban di masyarakat melalui koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini difokuskan pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum untuk mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan publik yang optimal. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut;

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta

Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini difokuskan pada pembinaan dan pengawasan pemerintah desa dalam menyusun kebijakan. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.

4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

5) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

6) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini difokuskan pada pemenuhan penunjang dalam rangka mendukung capaian pembangunan. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

5) Penyediaan Bahan/Material.

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Mebel.

2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

4) Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Tabel 4.1.
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Matesih

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
TJ 1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran 1: Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan		
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah			Nilai IKM		
			Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya pelayanan yang sesuai standar	Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya pembinaan Lembaga masyarakat desa	Jumlah Lembaga masyarakat desa yang dibina	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif		Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya wilayah yang mendapat pantauan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketentraman dan ketertiban umum	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi		persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Meningkatnya kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan	Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif		Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Meningkatnya pembinaan terhadap pemerintah desa	Jumlah Desa yang dilakukan pembinaan	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah		NILAI SAKIP	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Laporan Keuangan	Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02 .0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Persentase Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Bangunan Kantor yang Disediakan		
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang Disedikan	7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	
				Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08 .0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08 .0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Matesih yang disertai target indikator kinerja dan anggaran disampaikan melalui tabel berikut:

Tabel 4.2.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2030

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	%	100	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		Nilai IKM	Angka	89,23	82		83		83,1		83,2		83,3		83,4		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	Persentase	100	100	96.800.000	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	100	6.362.300	
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya pelayanan yang sesuai standar	Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar	kegiatan			96.800.000		6.362.300		6.362.300		6.362.300		6.362.300		6.362.300	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	96.800.000	12	6.362.300	12	6.362.300	12	6.362.300	12	6.362.300	12	6.362.300	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persentase		100	15.985.000		18.846.400		18.846.400		18.846.400		18.846.400		18.846.400	
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya pembinaan Lembaga masyarakat desa	Jumlah Lembaga masyarakat desa yang dibina	Lembaga Masyarakat			15.985.000		18.846.400		18.846.400		18.846.400		18.846.400		18.846.400	
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	9	9	10.985.000	9	5.000.000	9	5.000.000	9	5.000.000	9	5.000.000	9	5.000.000	
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	5.985.000	12	13.846.400	12	13.846.400	12	13.846.400	12	13.846.400	12	13.846.400	

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	Persentase	100	100	149.600.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya wilayah yang mendapat pantauan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketentraman dan ketertiban umum	Wilayah		9	149.600.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12		149.600.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	Persentase	100	100	31.600.000	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	100	80.807.000	
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan	Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan	Kegiatan			31.600.000		80.807.000		80.807.000		80.807.000		80.807.000		80.807.000	
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	90		26.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000	
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	50		5.600.000	50	9.207.000	50	9.207.000	50	9.207.000	50	9.207.000	50	9.207.000	

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	0				21.600.000		21.600.000		21.600.000		21.600.000		21.600.000	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	Persentase	100	100	4.800.000	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	100	19.064.100	
7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan terhadap pemerintah desa	Jumlah Desa yang dilakukan pembinaan	Desa		9	4.800.000		19.064.100		19.064.100		19.064.100		19.064.100		19.064.100	
7.01.06.2.01.0001 Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	0				3.150.000		3.150.000		3.150.000		3.150.000		3.150.000	
7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	9	9	4.800.000	9	6.820.000	9	6.820.000	9	6.820.000	9	6.820.000	9	6.820.000	
7.01.06.2.01.0003 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	0			9	3.319.100	9	3.319.100	9	3.319.100	9	3.319.100	9	3.319.100	
7.01.06.2.01.0005 Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	0			9	3.150.000	9	3.150.000	9	3.150.000	9	3.150.000	9	3.150.000	
7.01.06.2.01.0006 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	0			9	2.625.000	9	2.625.000	9	2.625.000	9	2.625.000	9	2.625.000	

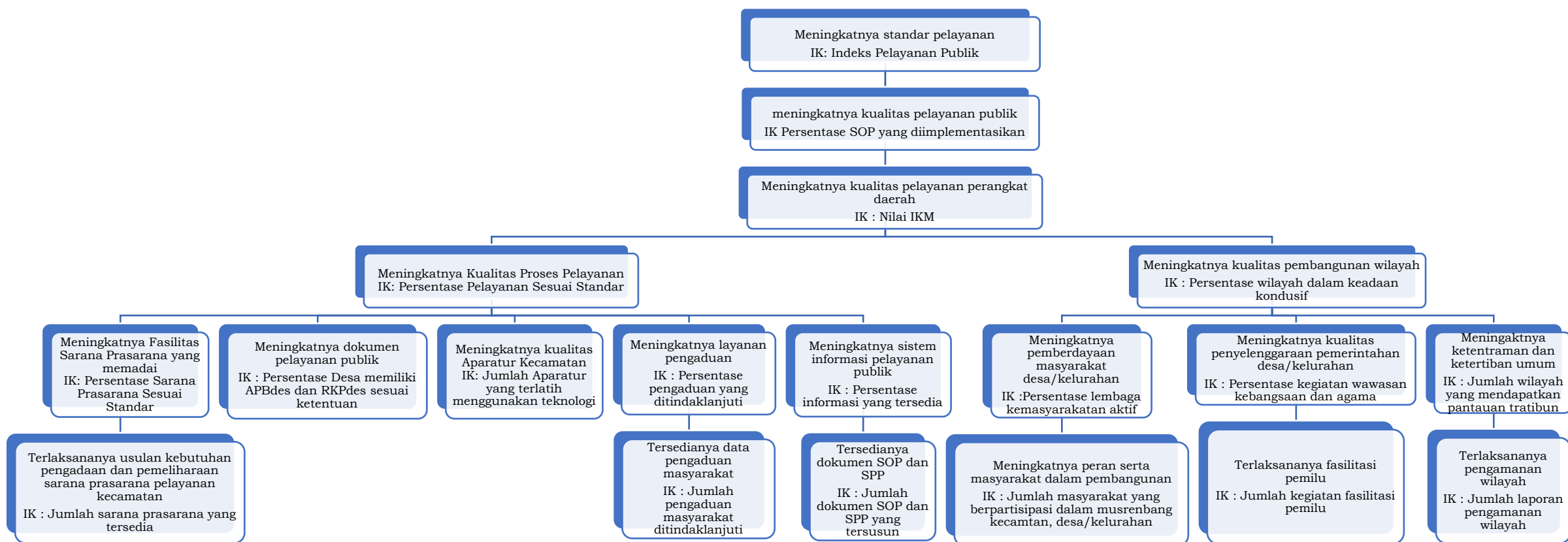
TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	NILAI SAKIP	Nilai	70,30	70,32	2.407.133.784	70,35	2.321.126.129	70,40	2.321.126.129	70,45	2.321.126.129	70,50	2.321.126.129	70,55	2.321.126.129	
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Persentase		100	1.553.175		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000			
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	1.553.175	4	8.000.000	4	8.000.000	4	8.000.000	4	8.000.000	4	8.000.000	
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan	Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun	Persentase			1.871.619.509		1.862.246.129		1.862.246.129		1.862.246.129		1.862.246.129			
7.01.01.2.02 .0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	15	15	1.871.619.509	16	1.862.246.129	16	1.862.246.129	16	1.862.246.129	16	1.862.246.129	16	1.862.246.129	
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Persentase Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Persentase					128.380.000		128.380.000		128.380.000		128.380.000			
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	4.562.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	18.196.100	12	23.000.000	12	23.000.000	12	23.000.000	12	23.000.000	12	23.000.000	
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	7.160.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	13.136.000	12	13.000.000	12	13.000.000	12	13.000.000	12	13.000.000	12	13.000.000	
7.01.01.2.06.0006 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	1.380.000	12	1.380.000	12	1.380.000	12	1.380.000	12	1.380.000	12	1.380.000	

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Bahan/Materiah yang Disedikan	Paket	12	12	1.865.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	182.092.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Persentse			70.100.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000			
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			6.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	
7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Unit	0	0	64.100.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase					209.000.000		209.000.000		209.000.000		209.000.000			
7.01.01.2.08 .0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	39.000.000	12	39.000.000	12	39.000.000	12	39.000.000	12	39.000.000	12	39.000.000	
7.01.01.2.08 .0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	159.480.000	12	170.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Persentase		100	37.090.000		43.500.000		43.500.000		43.500.000		43.500.000			

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	36.340.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	750.000	1	8.500.000	1	8.500.000	1	8.500.000	1	8.500.000	1	8.500.000	

Sumber : Hasil Analisis Data pada Kecamatan Matesih

Secara ringkas dukungan (OPD) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, digambarkan dalam bentuk Pohon Kinerja berikut :



Gambar 4.1.
Pohon Kinerja Kecamatan Matesih

Berikut ini program prioritas dan program unggulan daerah dalam lima tahun ke depan:

Tabel 4.3.
Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
2	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terciptanya situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan umum yang efektif dan terkoordinasi	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5
			7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
			7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
5	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0001 Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0003 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			7.01.06.2.01.0005 Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			7.01.06.2.01.0006 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
6	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02 .0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5
			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
			7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	
			7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	
			7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.08 .0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			7.01.01.2.08 .0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber : Hasil Analisis Data pada Kecamatan Matesih

Berikut ini dukungan Kecamatan Matesih pada 35 Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah yang didelegasikan ke Kabupaten/Kota:

Tabel 4.4.
Dukungan Kegiatan Kecamatan Matesih Terhadap 35 Program Prioritas
Provinsi Jawa Tengah yang Didelegasikan ke Kabupaten/Kota

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan/Subkegiatan	Urusan
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	Kewilayahan (Kecamatan)
2	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru		Kewilayahan (Kecamatan)
3	BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)		Kewilayahan (Kecamatan)
	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana		Kewilayahan (Kecamatan)
4	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya		Kewilayahan (Kecamatan)
5	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata		Kewilayahan (Kecamatan)

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan/Subkegiatan	Urusan
		Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1.Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Matesih

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Matesih Tahun 2025–2029, telah dirumuskan sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan dan terukur. Indikator tersebut dipilih untuk memastikan ketercapaian tujuan strategis, seperti meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kecamatan.

Melalui penguatan kinerja berbasis indikator ini, Kecamatan Matesih berkomitmen untuk mendorong pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan berdaya saing dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan Kabupaten Karanganyar sesuai visi dan misi Kepala Daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Matesih tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Matesih Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai IKM	Nilai	82	83	83,1	83,2	83,3	83,4	

Sumber : Hasil Analisis Data pada Kecamatan Matesih

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Matesih akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Karanganyar. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.

5.2. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2030.

5.3. Pedoman Penyusunan Evaluasi dalam Manajemen Pengelolaan Resiko

Dokumen Renstra Kecamatan menjadi dasar dalam penyusunan Manajemen Pengelolaan Risiko dengan melakukan analisis atas resiko

penyebab dan dampak pada rencana strategis organisasi dan rencana operasional organisasi.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2029 ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

